



LAPORAN PENELITIAN

**STUDI EVALUASI PERKEMBANGAN FUNGSI
INPRES BANTUAN DESA PADA PENDANAAN
PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA
DI KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**

Oleh :

Drs. H. Aufarul Marom
Dra. Endang Hari Umi, SU
Dra. Sri Suwitri, Msi
Drs. Purbayu, MS.
Drs. Teguh Yuwono

Dibiayai oleh DIP Bagian Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas
Universitas Diponegoro

Nomor : 202/XXIII/3/-/1996 Tanggal 30 Maret 1996
Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Penelitian
No : 211A/PT09.OP/B/1996
Tanggal 2 September 1996

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian	: STUDI EVALUASI PERKEMBANGAN FUNGSI INPRES BANTUAN DESA PADA PENDANAAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
2. Ketua Peneliti	
a. Nama	: Drs. H. Aufarul Marom
b. NIP	: 131 681 411
c. Golongan	: III a
3. Susunan Peneliti	:
Jumlah Anggota	: 4 orang
4. Lembaga	: Pusat Kajian Pembangunan, Lembaga Penelitian, Universitas Diponegoro
5. Jangka Waktu	: 6 bulan
6. Sumber Dana	: OPF Universitas Diponegoro Nomor : 202/XXIII/3/-/1996 Tgl 30 Maret 1996
7. Jumlah Dana	: Rp 2.480.000,- (Dua Juta Empat Ratus DelapanPuluh Ribu Rupiah)

Semarang, 15 Januari 1997

Mengetahui
Ka. Puslit Kajian Pembangunan

Ketua Tim Peneliti

Drs. H. Wiratno, MEC.
NIP 130 368 082

Drs. H. Aufarul Marom
NIP 131 681 411

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP



KATA PENGANTAR

Tujuan semula Inpres Bantuan Pembangunan Desa (Inpres Bandes) adalah sekedar bantuan kepada Desa dalam upaya desa menyediakan dana pembangunan yang berupa uang. Sifat bantuan sebenarnya dapat dihentikan manakala yang dibantu telah mampu mengatasi masalahnya. Tidak demikian halnya dengan Inpres Bandes, yang telah berlangsung selama kurang lebih 27 tahun. Jumlah bantuan secara periodik malah bertambah; Semula hanya Rp. 100.000,- (1969) sekarang telah mencapai Rp. 6.500.000,- Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah ada perkembangan fungsi Inpres Bandes? Dari sekedar bantuan menjadi subsidi rutin? Sebaliknya Desa harus dapat mempertanggungjawabkan subsidi tersebut. Untuk membahas pertanyaan tersebut dilakukan studi terhadap Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) di lima Desa dalam wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Dati II Demak.

Dalam mendapatkan data yang diperlukan, Peneliti sangat dibantu oleh Camat Mranggen dan stafnya yaitu Ka Sie Pemerintahan, Ka Sie Pembangunan serta kepala Desa Sampel khususnya Kades Baturesari dan Ketua LKMD-nya. Berkenaan dengan bantuan tersebut, Peneliti ucapkan terima kasih dan semoga bantuannya dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan. Ucapan terima kasih yang sama, Peneliti sampaikan pula kepada:

1. Ketua Lembaga Penelitian-UNDIP dan Ketua Puslit Kajian Pembangunan UNDIP, atas fasilitas dan kesempatan yang telah diberikan,
2. Dekan FISIP - UNDIP atas izin untuk melakukan penelitian dan penyusunan laporannya,
3. Pihak lain yang tidak mungkin Peneliti sebut satu persatu.

Akhir kata semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang berminat pada kajian Pembangunan Pedesaan dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Tiada gading yang tak retak, apabila dalam tulisan dan pembahasan ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, Peneliti tidak keberatan untuk suatu koreksi perbaikan. Terima kasih

Semarang, Januari 1997.

Team Peneliti.

DAFTAR ISI.

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Perumusan Masalah	3
C. Tinjauan Kepustakaan	3
D. Tujuan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
E.1. Tipe Penelitian	6
E.2. Teknik Pengumpulan Data	6
E.3. Populasi dan Sampel	6
E.4. Analisis Data	7
F. Kontribusi Penelitian	7
BAB II DISKRIPSI KECAMATAN MRANGGEN	
A. Pemanfaatan Tanah	8
B. Wilayah dan Administrasi Pemerintahan	10
C. Kependudukan	12
D. Dinamika Pembangunan Desa	16
BAB III OTONOMI DESA DI KECAMATAN MRANGGEN	
A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	22
B. Pengelolaan Keuangan Desa	29
C. Partisipasi Masyarakat	45
BAB IV PERKEMBANGAN FUNGSI INPRES BANTUAN DESA	
A. Arti dan Tujuan Inpres Bandes	51
B. Kedudukan Inpres Bandes dalam Pembangunan Desa	53
C. Perimbangan Inpres Bandes terhadap Penerimaan Asli Desa	56

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1	Tabel II.1.	DESKRIPSI PEMANFAATAN TANAH DI KECAMATAN MRANGGEN	9
2	Tabel II.2.	DESKRIPSI WILAYAH KEC MRANGGEN MENURUT JUMLAH DESA, LUAS WILAYAH, JUMLAH DUKUH, RW DAN RT	11
3	Tabel II.3.	JUMLAH PENDUDUK MENURUT KLASIFIKASI BALITA, ANAK-ANAK DAN DEWASA DI KECAMATAN MRANGGEN	14
4	Tabel II.4.	MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KECAMATAN MRANGGEN	15
5	Tabel II.5.	TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DI KECAMATAN MRANGGEN 1996	18
6	Tabel III.1.	SEBARAN APARAT DESA MENURUT KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	25
7	Tabel III.2.	RATIO APARAT DESA DENGAN PENDUDUK	26
8	Tabel III.3.	PERKEMBANGAN PENERIMAAN DESA SUMBEREJO SELAMA 5 TAHUN (1991/1992 S/D 1995/1996)	36
9	Tabel III.4.	PERKEMBANGAN PENERIMAAN DESA BATURSARI SELAMA 5 TAHUN (1991/1992 S/D 1995/1996)	38
10	Tabel III.5.	PERKEMBANGAN PENERIMAAN DESA MENUR SELAMA 5 TAHUN (1991/1992 S/D 1995/1996)	40
11	Tabel III.6.	PERKEMBANGAN PENERIMAAN DESA MRANGGEN SELAMA 5 TAHUN (1991/1992 S/D 1995/1996)	42
12	Tabel III.7.	PERKEMBANGAN PENERIMAAN DESA NGEMPLAK SELAMA 5 TAHUN (1991/1992 S/D 1995/1996)	44
13	Tabel III.8.	PERKEMBANGAN SWADAYA MASYARAKAT SELAMA 5 TAHUN DI KECAMATAN MRANGGEN	48
14	Tabel IV.1.	PERKEMBANGAN PENERIMAAN DESA SELAMA 5 TAHUN	57

ABSTRAKSI

STUDI EVALUASI PERKEMBANGAN FUNGSI INPRES BANTUAN DESA PADA PENDANAAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK.

Desa berotonomi, tetapi Desa bukan Daerah Otonom. Otonomi Desa disebut urusan rumah tangga Desa, yang bersumber dari kebutuhan masyarakat Desa. Untuk membiayai otonominya, Desa mempunyai sumber Keuangan yang dapat digali dari Desa sendiri maupun bantuan dari Pemerintah tingkat atasan. Dalam rangka pembangunan Nasional, sejak tahun 1969, Desa memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat. Bantuan itu dikenal dengan istilah Inpres Bandes, bersifat rutin dan secara periodik jumlah nominal sesuai naik. Tujuan semula adalah untuk merangsang atau motivasi pembangunan di Desa. Konsekwensi dari penerimaan bantuan ini Desa harus menyusun suatu anggaran penggunaan bantuan, dalam bentuk Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD). Ada issue bahwa bantuan yang semula sifatnya pendamping berkembang menjadi sumber dana utama pembangunan Desa, yang tak lain adalah penyelenggaraan otonomi Desa. Hal tersebut mendorong untuk melakukan : STUDI EVALUASI PERKEMBANGAN FUNGSI INPRES BANTUAN DESA PADA PENDANAAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA.

Titik berat pengamatan ditujukan pada APPKD di lima Desa dalam wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Untuk mengetahui perkembangan dilakukan studi terhadap APPKD pada lima tahun terakhir: 1991/1992 sampai dengan 1995/1996. Perumusan masalah adalah : bagaimana perkembangan keuangan Desa? bagaimana penyusunan program kegiatan Desa dilakukan? Bagaimana dukungan masyarakat terhadap penyusunan program kegiatan pemerintahan dan penyediaan dananya?

Telaah terhadap APPKD di lima Desa Sampel memberikan suatu kesimpulan bahwa besaran atau jumlah Inpres Bandes sebenarnya kecil dibanding dengan pendapatan asli Desa sendiri. Secara kuantitatif Inpres Bandes rata-rata hanya 27,25% dari pendapatan asli Desa sendiri. Walau pun demikian, fungsi Inpres Bandes ternyata sangat

penting artinya yaitu sebagai **DAYA PENGGERAK** dana pembangunan khususnya dan penyelenggaraan otonomi Desa umumnya. Disamping itu penggunaan dana Inpres Bandes memberikan motivasi atas penyusunan APPKD yang efisien dan efektif serta bertanggungjawab. Tujuan yang terakhir ini belum terwujud secara optimal, karena masih banyak hambatan yang bersumber pada SDM di Desa. Tingkat pendidikan yang relatif rendah dan rasa belum membutuhkan administrasi yang baik dapat ditemui di Desa.

Penyusunan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan Inpres Bandes. Penyusunan rencana program kegiatan dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan mengikut sertakan masyarakat secara perwakilan maupun langsung. Hasil rapat LKMD kemudian dibawa ke forum Lembaga Musyawarah Desa (LMD) untuk dibahas dan disetujui dalam bentuk Keputusan Desa. Sebelum dilaksanakan, Keputusan Desa ini harus disahkan oleh Bupati KDH II Demak. APPKD mulai berlaku pada tahun anggaran: 1 April - 31 Maret. Terlihat dalam APPKD di lima Desa Sampel bahwa ada ide penyeragaman perincian penerimaan dan pengeluaran Desa.

Pada umumnya masyarakat mendukung rencana program yang telah disusun. Bentuk dukungan dana rata-rata lebih besar dibanding jumlah Inpres Bandes, minimal sama. Ada tiga bentuk partisipasi masyarakat yaitu material, tenaga kerja dan uang. Untuk material dan tenaga kerja, dalam APPKD dikonversikan dalam harga uang. Swadaya atau gotong royong adalah istilah untuk menyebut partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Semakin besar manfaat yang dapat dinikmati masyarakat Desa secara langsung semakin mudah Pemerintah Desa mengumpulkan dana bagi dukungan suatu proyek/program kegiatan. Sebaliknya, bila masyarakat merasa tidak dapat menikmati secara langsung maka Pemerintah Desa cq. Kepala Desa harus bekerja keras untuk mencari dukungan dana melalui peningkatan usaha Desa, lelang tanah bengkok atau lainnya.

Berkenaan dengan hambatan yang bersumber pada SDM dalam rangka tertib administrasi perlu adanya pelatihan yang kontinyu dan penyederhanaan administrasi Desa. Pelatihan yang dilaksanakan hendaknya menjauhkan hal-hal yang sulit diikuti Aparat Pemerintah

Desa tetapi menjangkau maksud tertib administrasi yang diinginkan. Perlu pula penekanan disiplin dan tanggung jawab Aparat Desa dalam mengelola tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

ABSTRACT

AN EVALUATION STUDY ON THE FUNCTION OF THE RURAL DEVELOPMENT ASSISTANCE BY PRESIDENTIAL DIRECTIVE FOR THE FUNDING OF THE VILLAGE AUTONOMY OPERATION IN THE MRANGGEN SUBDISTRICT REGENCY OF DEMAK

A village with the autonomy is not an autonomous region. The village autonomy pertains to the household matters of the Village which springs from the needs of that Village community. To finance its autonomy the village has financial resources that can be explored from the village itself as well as from a higher level Governmental aid. Within the framework of the National Development, since 1969, Village receive aid from the Central Government. Said aid is known as Inpres Banpres (Rural Development Assistance by Presidential Directive) routinely and its nominal value is increased periodically. The initial aim is to stimulate or motivate Rural development. As a consequence of this assistance the village must draw up an Assistance Utilization Budget, in the form of APPKD (Village Budget).

An issue has it that an assistance which initially was only as a supplement, later on developed into the main funding source for rural development which is no less than rural autonomy operation. This stimulates us to carry out : AN EVALUATION STUDY ON THE FUNCTION OF RURAL DEVELOPMENT ASSISTANCE BY PRESIDENTIAL DIRECTIVE FOR THE FUNDING OF THE VILLAGE AUTONOMY OPERATION.

The main point of monitoring is fixed at the APPKD (Village Budget) in 5 (five) years rural areas in the subdistrict of Mranggen, Regency of Demak. In order to understand the development a study was carried out on the Rural Budget during these five years, 1991/1992 up to until 1995/1996. The definition of the problem was : How was the Rural Development, financially ? How is the programming on rural activities carried out ? How is the social support towards the programming of governmental activities and how are funds made available ?

The analysis upon Rural Budgeting in 5 (five) years sample villages resulted in a conclusion that the amount of the Rural Development Assistance by Presidential Directive - Inpres Bandes - is but small compared to the original income sources of the village itself - PADs. Quantitatively the Rural Development Assistance by Presidential Directive (Inpres Bandes) average only 27,25 % of PAD. Although as such, the Inpres Bandes - Rural Development Assistance by Presidential Directive (RDAPD) was apparently very important in that it serves as a MOVING POWER of development funds in particular and the operation of Village autonomy in general.

Besides that the utility of funds from the Inpres Bandes (RDAPD) gives a motivation towards the drawing up a more efficient, effective and responsible Village Budget. This ultimate goal is not yet achieved to a maximum degree due to many obstacles mostly originating from the human resources in the village. The relatively low level education and the sense of not having any need for a good administration is like to be found in many villages. The drawing up of governmental activities and development is done in line with the executional guidance of the Rural Development Assistance by Presidential Directive (RAPD Inpres Bandes). The drawing up of activities program planning is done by the Village Social Activities Group -LKMD- by inviting the people to participate directly or through its representative. The result of the LKMD is then brought to the LMD Forum - The Village Discussion Group - to be discussed and approved in a Village Decision. Before it is executed this Village Decision must be legalized by the Regent of the Second Autonomous Region of Demak. The APPKD or Village Budget becomes effective in the budget year 1 April - 31 March. It is apparent that in the Village Budget of five sample villages there tends to be a uniform idea regarding the Village Budget.

Generally, the community agrees to the program planning as drawn up. Funds supports are on the average bigger than Inpres Bandes -RDAPD- or at least the same. There are three kinds of community participation, material, manpower, and money. For materials and manpower the amounts are converted into money value in the APPKD - Village Budget. Self-supporting or mutual cooperation is terms that indicate community participation in the development program. The greater the benefit the village community feels, the easier it becomes for the

Village Administration to raise funds to support a project/activity program. On the other hand when the people feel it can not directly benefit from it then the Village Administration or the Village Chief must work to seek funding support through the increase of village efforts, e.g. the auction of village property or others.

Due to the obstacles which find its roots in the Human Resources, within the framework of correct administration there should be a continuous training and simplification of Village Administration. The training should not be too difficult for the Village Administrative Apparatus, but enhance the intended correct administration purpose. Moreover there should be a stress on discipline and responsibility on the part of the Village Apparatus in managing the task of the administration and development program.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Desa mempunyai otonomi, tetapi dinyatakan secara formal oleh Pemerintah bahwa desa bukan daerah otonom. Pada UU No 5 Th. 1979 otonomi desa disebut dengan urusan rumah tangga desa. Bentuk dan jumlah urusan rumah tangga desa tidak ada ukuran yang absolut sebagaimana jumlah urusan yang dimiliki daerah otonom. Guna penyelenggaraan urusan rumah tangganya, desa mempunyai penghasilan yang bersumber dari :

- a) Pendapatan asli desa yang meliputi: hasil tanah kas desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong masyarakat desa dan lain-lain usaha yang sah.
- b) Pendapatan dari Pemerintah atasan baik Pusat, Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II yang berupa sumbangan dan bantuan.
- c) Bagian dari pajak dan retribusi yang diserahkan kepada desa.

Dari ketiga sumber penghasilan, ada kecenderungan sub b) khususnya yang berupa Inpres Bantuan Desa dapat diketahui secara pasti tiap tahunnya. Sedang untuk sub a) dan c) seolah-olah berkedudukan sebagai penyempurna.

Dulu, desa membiayai pemerintahannya dari sumber penghasilan yang mendapatkan dukungan adat, baik berupa uang maupun *in-natura*, termasuk untuk imbalan kepada Kepala Desa dan perangkatnya. Bantuan dari Pemerintah atau pihak lain sifatnya pendamping. Sekarang, dengan ditetapkannya pembangunan nasional, bantuan dari Pemerintah yang diberikan secara rutin tiap tahun, menjadi penyangga utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jumlah bantuan selalu meningkat, bermula dari Rp 100.000,- sekarang telah mencapai Rp 6.000.000,-

Dalam telaah APPKD (Anggaran Penerimaan Pengeluaran Desa) secara umum, tersirat kecenderungan bahwa bantuan menjadi sumber utama dari desa, sebaliknya swadaya dan partisipasi masyarakat desa hanya pelengkap dalam hal pendanaan penyelenggaraan otonomi desa. Hal ini disebabkan karena sumber penghasilan desa yang legal menurut hukum negara dan didukung adat mengalami penyusutan. Berbagai faktor mempengaruhi penyusutan sumber penghasilan desa. Diinformasikan oleh Selo Sumardjan bahwa berbagai Undang-Undang yang diterbitkan Pemerintah Pusat yang masing-masing mengatur materinya dari sudut pandang sentral nasional dengan kurang memahami akibat-akibatnya merugikan kepentingan desa pada umumnya (YIIS, Vol. 2). Penyusutan sumber penghasilan desa yang utama, menyebabkan banyak desa yang tidak/kurang mampu membiayai penyelenggaraan rumah tangganya. Keadaan ini memberikan warna atau nuansa wajah desa memprihatinkan. Keterbelakangan yang

kemudian tampak, dan keadaan ini tidak diharapkan oleh Pemerintah. Solusi yang dikumandangkan Pemerintah, pembangunan nasional berhasil, kalau pembangunan desa berhasil. Inilah alasan diberikannya bantuan kepada desa, baik secara sektoral, terpadu maupun lokal

B. RUANG LINGKUP DAN PERUMUSAN MASALAH

Berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi desa muncul berbagai kendala antara lain : kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, kemampuan aparat yang dianggap masih kurang serta kurangnya kemampuan keuangan/dana. Masalah dana menjadi thema yang menarik, oleh karenanya pembahasan ditujukan kepada pengelolaan keuangan desa dengan titik berat pada fungsi Bantuan Desa (Inpres - Banded) dalam pendanaan otonomi desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana perkembangan keuangan desa selama lima tahun ?
- b) Bagaimana proses penyusunan program kegiatan Pemerintahan Desa ?
- c) Bagaimana dukungan masyarakat terhadap penyusunan kegiatan pemerintahan dan penyediaan dananya ?

C. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Desa menurut sejarah, mempunyai sifat negara. Soetardjo memberikan istilah “**drops-republik**”. Sifat negara memberikan suasana desa harus

mandiri. Sekarang sifat negara itu menyusut dan menempatkan desa hanya merupakan wilayah tempat tinggal persatuan masyarakat {UU No. 5 Th. 1979 Ps. 1 (e)}. Dalam rangka pembangunan nasional, maka desa menjadi sasaran paling bawah, mengingat kedudukan dan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia di desa. Kemandirian desa dalam pendanaan atau keuangannya serta penyelenggaraan pemerintahannya dipengaruhi oleh lingkup yang lebih luas. Pembangunan desa tidak lagi bersifat lokal tetapi harus berwawasan lingkungan dan terpadu. Kondisi ini mendorong cakupan kegiatan Pemerintahan Desa lebih kompleks, yang akibatnya adalah ketidakmampuan desa untuk menyediakan dana. Usaha Pusat maupun Pemerintah tingkat atasan adalah membantu desa dalam hal penyediaan dana, yang diberikan berupa subsidi/sumbangan dan bantuan.

Bantuan yang masuk ke desa bermacam-macam. Dari berbagai macam itu yang menjadi "*primadona*" adalah **Inpres Bandes**. Pemberian bantuan ini diikuti kewajiban desa untuk mempertanggung-jawabkan penggunaannya. Keseragaman pola pertanggung-jawaban diatur oleh Pemerintah. Demikian pula penyusunan program yang berkaitan dengan pengambilan dana bantuan. Pada proses penyusunan ini desa diberikan kebebasan atau keleluasaan untuk menyusun skala prioritas kebutuhannya, tetapi bukan berarti pilihan berlaku tetap. Akan ada penyesuaian prioritas dari desa terdekat yang mempunyai kesamaan kebutuhan. Orientasi kebutuhan yang menyangkut kepentingan umum - baik bagi desa sendiri ataupun desa lain - akan didahulukan pencantumannya dalam program.

Program tahunan kegiatan pemerintahan desa dituangkan dalam Anggaran Penerimaan Pengeluaran Desa (APPKD). Pada APPKD ini akan terlihat sumber penghasilan utama desa dan besarnya hasil. Penghasilan desa yang berasal dari desa sendiri ada dua macam pada umumnya yaitu dalam bentuk uang dan *in-natura*. Hanya dalam APPKD yang *in-natura* dikonversikan dalam Rupiah, sehingga akan terlihat bahwa hasil dari desa besar jumlahnya. Pernyataan ini tidak bermaksud mengurangi atau menghapus kenyataan bahwa ada desa yang kaya dengan sumber penghasilan murni memberikan jumlah Rupiah yang besar dan mencukupi kebutuhan bagi pendanaan pemerintahannya.

D. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mencari jawab permasalahan, dilakukan penelitian yang bertujuan :

- a) Untuk mengetahui perimbangan keuangan desa murni dengan bantuan desa.
- b) Untuk mengetahui bagaimana penyusunan program kegiatan pemerintahan dilakukan.
- c) Untuk mengetahui kesesuaian kebutuhan masyarakat dengan program yang tersusun.
- d) Untuk mengetahui dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program.

E. METODE PENELITIAN

E.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang didasarkan atas studi kualitatif dan lebih diarahkan untuk melihat perkembangan fungsi Inpres Bantuan Desa dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa khususnya dilihat dari segi pendanaan.

E.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat kuessioner dan juga dengan melakukan wawancara secara intensif. Dengan cara ini diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap. Selain itu pengumpulan data penunjang yang bersifat sekunder juga dilakukan untuk melengkapi atau memperjelas informasi yang diperlukan.

E.3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Pemilihan lokasi Mranggen ini mengingat dan mempertimbangkan curahan waktu, tenaga, biaya dan keadaan yang ada. Tetapi yang lebih utama adalah karena masih terdapatnya “desa” yang tentunya memperoleh “Bantuan Desa” dari Pemerintah yang merupakan permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga dengan

demikian yang merupakan Populasi dalam penelitian ini adalah semua desa yang ada di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Diantara sekian banyak desa yang ada di Kecamatan Mranggen akan diambil sebanyak 5 desa yang diharapkan bisa mewakili desa-desa lainnya. Dari 5 desa yang menjadi Sampel I akan dipilih lagi sebanyak 10 orang yang akan dijadikan sebagai responden serta akan dimintai keterangannya. Ke 10 ini terdiri dari aparat desa, ketua atau anggota LKMD atau LMD, tokoh masyarakat dan warga masyarakat biasa. Merekalah yang merupakan sampel dalam penelitian ini.

E.4. Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian yang deskriptif kualitatif, maka data yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini akan dilakukan analisa dengan analisis deskriptif yang akan mampu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya juga perkembangan yang ada.

F. KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan dan pemahaman tentang otonomi desa dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri.